PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. Ile Napo, Kel. Pukentobi Wangi Bao
www.bapenda.florestimurkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020, yang pada hakekatnya merupakan gambaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai institusi penopang Pendapatan Asli Daerah di Kapupaten Flores Timur, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

LAKIP mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat kendali sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang dilaporkan secara transparan kepada masyarakat membantu perwujudan *good corporate governance.*

Sedangkan dari dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini membantu internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan *self assesment* atas kinerjanya guna perbaikan di masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur ini merupakan LAKIP tahun perdana sejak terbentuknya Badan Pendapatan Daerah sehingga disadari masih banyak kesalahan, kekurangan dan keterbatasan.

Semoga LAKIP perdana Badan Pendapatan Daerah ini menjadi bahan kajian dan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaannya diwaktu mendatang serta sebagai motivasi bagi semua jajaran aparatur Badan Pendapatan untuk berbenah menata dan memacu kinerja dalam rangka meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Flores Timur,

Ir. TULIT BENI

Pembina Utama Muda

Nip.196408171992031018

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

hal.

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

IKHTISAR EKSEKUTIF **3- 4**

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 5 - 6

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 7

1.3. DASAR HUKUM 8

1.4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 9 – 1

1.5. ISU-ISU STRATEGIS 12 – 13

1.6. KOMPOSISI PEGAWAI 13 – 16

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 17

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA 18 - 19

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURA KINERJA 20 – 24

3.2. AKUNTABLITAS KEUANGAN 25 - 27

BAB IV : PENUTUP 28

LAMPIRAN

- Form Rencana Kinerja Tahun 2020
- Form Penetapan Kinerja Tahun 2020
- Rincian Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bapenda TA. 2020
- Laporan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah TA. 2020
- Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Flores Timur TA. 2020.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2020-2022 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKIP Tahun 2020 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. LKIP Tahun 2020 ini menyajikan keberhasilan maupun faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Kabupaten Flores Timur semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020-2022.

Pada tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah menetapkan 2 (Dua) Sasaran Strategis yang meruapakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2022 , khususnya pada Tahun Pertama Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- Meningkatnya realisasi PAD terhadap target PAD.
- Meningkatnya porsi PAD terhadap total pendapatan Daerah (APBD)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari Dua sasaran di atas adalah sebesar 87,97 %. Hasil ini mencerminkan kinerja Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2020. Pencapaian Kinerja tersebut dilaksanakan melalui 4 program dan 25 kegiatan (termasuk kegiatan penunjang) yang capaiannnya bisa dilihat pada tabel :

Tabel 1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN KINERJA	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Meningkatnya Realisasi PAD terhadap TargetPAD	80,77	Berhasil
2	Meningkatnya Porsi PAD terhadap APBD	95,17	Berhasil
	Rata – Rata Capaian	**87,97**	**Berhasil**

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiaan sasaran sbb :

1) Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik karena situasi pandemic Covid 19
2) Situasi Pandemik Covid-19 yang membuat banyak usaha ekonomi masyarakat lumpuh yang berdampak pada berkurang sumber pendapatan Daerah.
3) Belum optimalnya pendataan potensi pendapatan.
4) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pendapatan.
5) Sarana dan prasarana yang terbatas.

Strategi pemecahan masalah / langkah-langkah yang telah dilaksanakan :

1) Memfasilitasi pelaksanaan sistim pemabayaran secara Online dengan pihak Bank persepsi
2) Memfasilitasi kerjasama dengan pihak Badan Pertanahan untuk dapatkan data transaksi pertanahan secara Online melalui Host to Host.
3) Melakukan pembenahan perangkat hukum sebagai dasar pelaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
4) Pengembangan sistem informasi pendapatan.berbasis ITE
5) Optimalisasi Pendapatan melalui koordinasi rutin dengan semua instansi pengelola pendapatan daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setip Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi

dan misi daerah, melainkan dengan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Taun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

VISI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan adalah "**Terwujudnya Kemandirian Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**".

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan **MISI** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
3. Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan Sistem On Line.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan dan retribusi.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan MENPAN RB No. 29 Th.2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

a. Meningkatkan kapasitas Pendapatan Daerah yang makin optimal
b. Meningkatkan potensi Penerimaan Pendapatan Daerah
c. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya
d. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima terhadap masyarakat.
e. Meningkatkan modernisasi informasi layanan pendapatan daerah.

1.3. DASAR HUKUM

Penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 mengacu pada:

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

   Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur;

1.4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur kemudian dipecah menjadi dua yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

B. Tugas Pokok Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sub urusan pendapatan.

C. Struktur Organisasi

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur diatur Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**
2. **Sekretaris**, yang membawahi :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

3. **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**, yang membawahi :
    a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
    b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
4. **Bidang Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah**, yang membawahi :
    a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah
    b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
5. **Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**, yang membawahi:
    a. Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
    b. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
6. **Kelompok Jabatan Fungsional**
7. **Unit Pelaksana Teknis Badan.**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

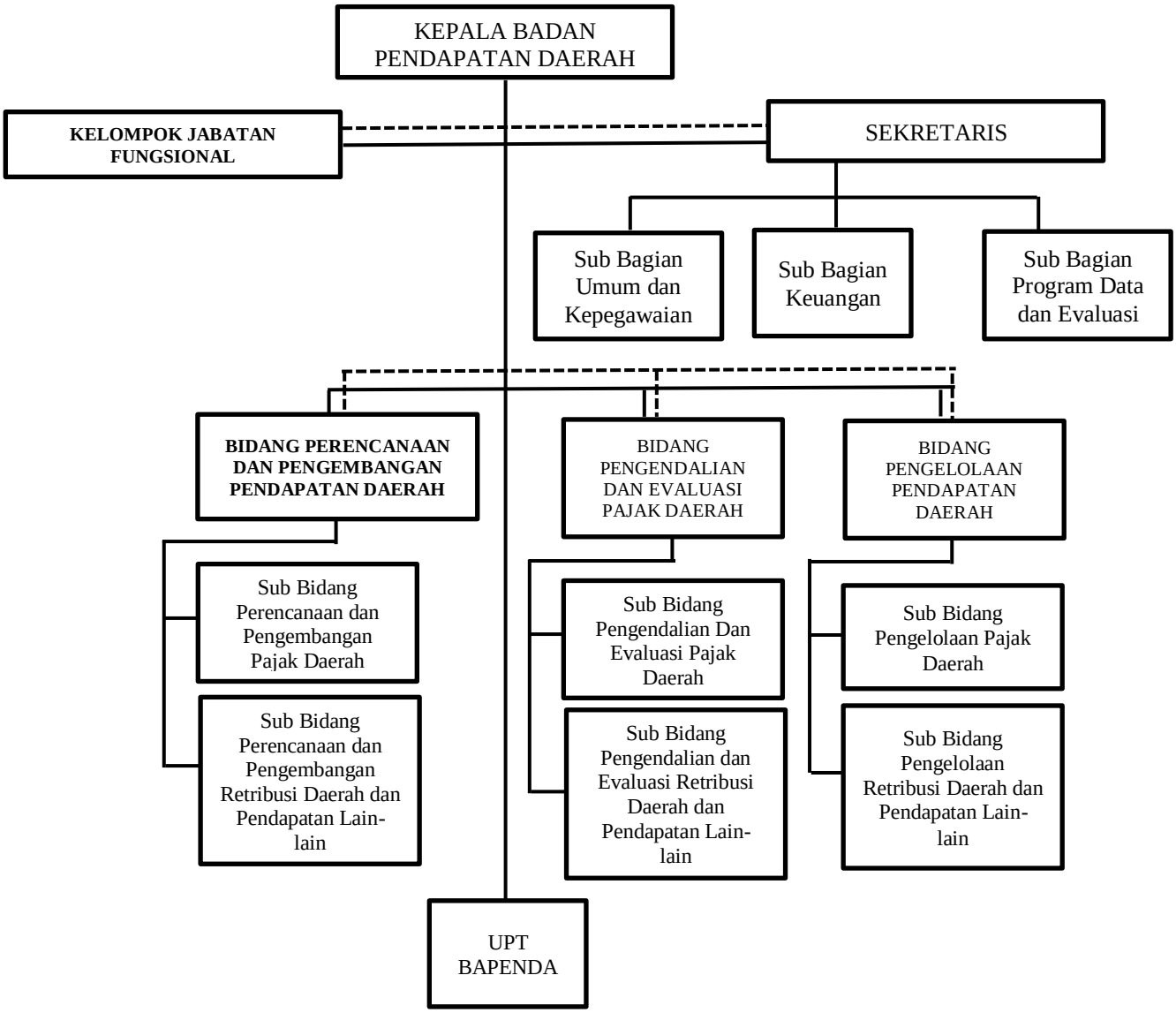

1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sehingga Visi, Misi, Program dan Kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur antara lain:

- Belum optimalnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah;
- Rendahnya penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menghadapi Isu-isu strategis di dalam Badan Pendapatan Daerah, maka ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam penyelesaian isu-isu strategis ini.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut :

1. *Didukung oleh SDM yang Profesional*

   Badan Pendapatan Daerah sebagai institusi Perangkat Daerah mengemban fungsi manajemen di Badan Pendapatan Daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan sebagai manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan.

   Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Di sini Sumber Daya Aparatur Yang Profesional memiliki posisi yang penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan yang baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. *Berbasis kondisi lokal*

   Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah, akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah.

3. *Mendukung Kebijakan Desentralisasi fiskal*

   Pendapatan Asli Daerah harus tetap pada kerangka dan arah desentralisasi fiskal merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah untuk mengelola dan menggerakan semua potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk mewujudkan Desentralisasi Fiskal yang semakin meningkat dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembiayaan pembangunan .

4. *Akomodatif terhadap dinamika global*

   Pendapatan Daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa pendapatan dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah menghadapi arus globalisasi.

1.6. KOMPOSISI PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 112 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 37 orang dan tenaga Non PNS/Honorer (Tenaga Teknis Pendukung Administrasi Perkantoran) sebanyak 74 orang, yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah dan Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	IV/C	1
2.	IV/B	1
3.	IV/A	2
4.	III/D	6
5.	III/C	6
6.	III/B	3
7.	III/A	2
8.	II/D	8
9.	II/C	5
10.	II/B	2
11.	II/A	-
12.	I/D	-
13.	I/C	1
14.	I/B	-
Jumlah		**37**

Tabel 1.2

Jumlah dan Komposisi ASN berdasarkan Esselon

NO.	ESELON	JUMLAH (orang)
1.	II.b	1
2.	III.a	1
3.	III.b	3
4.	IV.a	13
5.	Non Eselon	19
TOTAL		**37**

Tabel 1.3

Jumlah dan Komposisi ASN berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO.	DIKLAT Strktural	JUMLAH (orang)
1.	PIM II	-
2.	PIM III	1
3.	PIM IV	3
4.	Belum Mengikuti PIM	33
TOTAL		**37**

Tabel 1.4

Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

- ***Pegawai Negeri Sipil :***

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	-
2	S1	7
3	Diploma III	6
4	SLTA	22
5	SLTP	1
6	SD	1
TOTAL		**37**

- ***Pegawai Kontrak :***

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	-
2	S1	17
3	Diploma III	9
4	SLTA	34
5	SLTP	3
6	SD	14
TOTAL		**77**

Tabel 1.5

Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan berdasarkan Sub Unit

NO.	SUB UNIT	JUMLAH (orang)
1.	Pimpinan/Kepala Badan	1
2.	Sekretariat (***PNS***)	12
	Sekretariat (***Tenaga Kontrak***)	7
3.	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah (***PNS***)	4
	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah (***Tenaga Kontrak***)	3
4.	Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah (***PNS***)	3
	Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah(***Tenaga Kontrak***)	3
5.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (***PNS***)	3
	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (***Tenaga Kontrak***)	7
6.	UPT (***PNS***)	14
	UPT (***Tenaga Kontrak***) Juru Pungut	36
7.	Petugas Kebersihan	15
8.	Penjaga Pasar	4
9..	Penjaga Malam/Kantor	2
10.	Tenaga Yang Diperbantukan Pada UPT	4
Jumlah PNS		**37**
Jumlah Tenaga Kontrak di Kantor		**22**
Jumlah Tenaga Kontrak Di UPT		**55**
TOTAL SELURUHNYA		**114**

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.5 Isu Strategis yang dihadapi oleh SKPD
- 1.6 Komposisi Pegawai
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
- 2.1 Perjanjian dan Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP
- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

Lampiran-lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah tahun pertama dengan mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022, yang memuat sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran dan indikator kinerja masing-masing termuat dalam beberapa program sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Realisasi PAD terhadap Target PAD	Persentasi Realisasi terhadap Target	100 %
2.	Meningkatnya Porsi PAD terhadap Total APBD	Persentasi PAD terhadap APBD	6 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permaslahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatam/kendala dan permasalahan.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Badan Pendapatan Darah Kabupaten Flores Timur melaksanakan penilaian kinerja berpedoman pada Perjanjian Kinerja yang dibuat diawal tahun 2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data Kinerja yang hasilnya akan memberikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk perbaikan dan peningkatan di waktu yang akan dating.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran menggunakan Skala Pengukuran 4 (Empat) Kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Progres Positif

Rentang Capaian	Kategori Capaian
> 100 %	Sangat Baik
75 % - 100 %	Baik
55 % - 75 %	Cukup
< 55 %	Kurang

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini diuraikan Capaian Indikator Kinerja pada Badan Pendapatan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur

Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian	Kategori
Meningkatnya Realisasi PAD terhadap Target PAD	Persentasi Realisasi terhadap Target	100 %	80,77 %	80,77 %	Baik
Meningkatnya Porsi PAD terhadap Total APBD	Persentasi PAD terhadap APBD	6 %	5,71 %	95,17 %	Baik
Rata – rata Capaian Indikator Kinerja				**87,97 %**	**Baik**

Uraian dan penjelasan pencapaian Kinerja di atas dapat disajikan berdasarkan Capaian Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini adalah yang dikelola langsung dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Kabupaten Flores Timur.

Target dan Realisasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

NO	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
A.	**Hasil Pajak Daerah**		
1.	Pajak Hotel	96.150.000,00	59.935.759,00
2.	Pajak Restoran	917.120.000,00	1.345.030.105,00
3.	Pajak Reklame	236.261.000,00	114.896.000,00
4.	Pajak Penerangan Jalan	5.700.000.000,00	5.575.697.834,00
5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.190.241.950,00	859.961.875,80
6.	Pajak Air Tanah	5.651.000,00	6.043.400,00
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.749.165.229,00	2.276.170.113,00
8.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000,00	429.760.050,00
B.	**Hasil Retribusi Daerah**		
1.	Retribusi Jasa Umum	414.593.000,00	337.450.500,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	364.942.500,00	308.994.101,00
C.	**Lain-lain PAD yang Sah**	5.997.919,00	17.933.539,00
Total Penerimaan		**14.030.122.598,00**	**11.331.873.276,80**
Persentasi Pencapaian		**80,77 %**	

Pengukuran pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi PAD :

Target	Realisasi	Pencapaian
Rp 14.030122.598,-	Rp 11.331.873.276,80	80,77 %
100 %	**80,77 %**	**80,77 %**

2. Meningkatnya Porsi PAD terhadap APBD :

a. Target dan Realisasi PAD :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur berperan mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah. Tugas Koordinasi dan fasilitasi untuk secara optimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan semua potensi yang dikelola pada masing – masing Instansi pengelola PAD.

Target dan Realisasi pendapatan Daerah dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.4.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Pajak Daerah	13.244.589.179,00	10.667.495.136,80
2.	Retribusi Daerah	23.303.648.400,00	21.556.387.604,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.488.206.825,00	4.788.206.825,21
4.	Lain – lain PAD yang sah	21.217.269.453,00	15.018.612.177,00
	Total Jumlah	**64.253.713.857,00**	**52.030.701.743,00**
	Persentasi		**80,98**

Pencapaian target dan realisasi pendapatan asli daerah tersebut di atas adalah hasil koordinasi Badan Pendapatan Daerah kepada semua Organisasi Perangkat Daerah pengelola PAD secara keseluruhan .

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari masing – masing OPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi PAD pada OPD pengelola Kabupaten Flores Timur

NO	NAMA OPD	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Badan Pendapatan daerah	14.030.122.598,00	11.331.873.276,80	80,77
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.805.456.825,00	9.658.803.480,22	57,47
3	Dinas Kesehatan	2.335.139.789,00	2.044.843.193,03	87,57
	Dana Kapitasi JKN (SP2B)	10.449.776.861,00	9.584.126.025,00	91,72
4	Rumah Sakit Umum Daerah	18.528.972.100,00	17.719.184.896,00	95,63
5	Dinas PU PR	564.387.338,00	389.651.337,98	69,04
6	Dinas Lingkungan Hidup	47.000.000,00	50.549.000,00	107,55
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	220.138.800,00	124.821.200,00	56,70
8	Dinas Koperasi UKM	25.000.000,00	30.995.000,00	123,98
9	Dinas PM PTSP	140.000.000,00	154.034.500,00	110,02
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	673.800.000,00	685.296.138,00	97.70
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	60.000.000,00	65.738.000,00	109,56
12	Dinas Pertanian&Ketahanan Pangan	63.000.000,00	76.984.546,00	122,20
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	79.597.546,00	28.208.000,00	35,44
14	Dinas Perindustrian & Perdagangan	20.000.000,00	13.642.500,00	68,21
15	Dinas Perhubungan	211.322.000,00	98.950.650,00	46.82
	Total PAD	**64.253.713.857,00**	**52.030.701.743,00**	**80,98**

b. Realisasi Postur APBD Tahun 2020 :

NO	SUMBER	JUMLAH (Rp)
1	PAD	52.030.701.743,00
2	DANA PERIMBANGAN	824.641.770.251,00
3	LAIN – LAIN	34.821.010.000,00
	TOTAL APBD	**911.493.481.994,00**

Dengan demikian Porsi PAD terhadap APBD sebagai berikut :

PAD 2020	APBD 2020	Persentasi
Rp 52.030.701.743,00	Rp 911.493.481.994,00	5,71%

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Porsi PAD terhadap APBD adalah sebagai berikut :

TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
6 %	5,71 %	95,17

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dan Realisasi .

Biaya kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 untuk mencapai target dan sasaran serta indikator yang ada pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022, sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 terdiri dari :

- **Pendapatan** sebesar Rp. 14.030.122.598,00 dengan mencapai Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 11.331.873.276,80 atau 80,77 % .
- **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp.1.693.871.360,00 mencapai realisasi sebesar Rp.1.652.759.074,00 atau 97,57%.
- **Belanja Langsung** sebesar Rp.2.512.571.147,00 mencapai realisasi sebesar 2.431.612.227,00 atau 96,77% .

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung terdiri dari 4 (empat) Program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Program / Kegiatan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**1.273.548.218,00**	**1.286.123.127,00**	**1.248.644.098,00**	**97,08%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.050.000,00	4.768.600,00	94,42%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000,00	42.865.800,00	33.115.800,00	77,25%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00,-	9.750.000,00	8.602.560,00	88,23%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.971.000,00	5.780.000,00	5.123.900,00	88.64%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	56.400.000,00	52.100.000,00	50.450.000,00	96,83%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.289.000,00	5.819.500,00	5.586.500,00	95,99%
Penyediaan alat tulis kantor	71.236.000,00	68.540.500,00	67.736.500,00	98,82%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	71.331.000,00	36.163.200,00	34.374.800,00	95,05%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.042.218,00	5.444.027,00	4.191.188,00	76,98%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	684.000,00	0,00	0,00	0%
Penyediaan makanan dan minuman	9.350.000,00	20.830.000,00	19.479.550,00	93,51%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	95.595.000,00	85.480.100,00	85.314.700,00	99,80%
Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	887.694.000,00	948.300.000,00	929.900.000,00	98,05%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR	**95.000.000,00**	**84.266.000,00**	**80.699.734,00**	**95,76, %**
Pengadaan mebeleur	37.000.000,00	41.990.000,00	38.650.000,00	98,05%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31.900.000,00	22.900.000,00	22.898.734,00	99,99%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.900.000,00	8.176.000,00	8.090.000,00	98,94%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	11.061.000,00	98,75%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**29.740.000,00**	**26.587.000,00**	**25.380.500,00**	**95,46%**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.740.000,00	26.587.000,00	25.380.500,00	95,46%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**1.153.792.000,00**	**1.115.595.020,00**	**1.076.887.895,-**	**96,53%**
Pengadaan Sarana Pungutan	173.053.000,00	172.780.000,00	172.776.000,00	99,99%
Implementasi Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB	268.540.000,00	346.310.000,00	339.202.320,00	97,94%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	108.240.000,00	91.972.400,00	85.362.600,00	92,81%
Penatausahaan Pendapatan dan Penagihan Penerimaan Daerah	301.838.000,00	269.003.000,00	251.153.600,00	93,36%
Pemeliharaan Pasar Daerah	74.130.000,00	78.890.010,00	75.615.475,00	95,84%
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	67.717.000,00	7.212.500,00	6.692.500,00	92,79%
Pendataan/Pemutakhiran Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	160.374.000,00	149.427.110,00	146.085.400,00	97,76%
TOTAL SELURUHNYA	**2.552.080.218,-**	**2.512.5 71.147,-**	**2.431.612.227,-**	**96,77%**

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai Capaian Kinerja.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya.

Sangat disadari bahawa laporan ini blm secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Di masa mendatang, Badan Pendapatan Daerah akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan wujudkan bersama.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar, upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah.

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan langkah-langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksaan yang efisien, ketersediaan SDM Aparatur yang profesional, peningkatan yang akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, pelayanan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Ir. TULIT BENI
Pembina Utama Muda
Nip.196408171992031018

Scanned by TapScanner